

# PC Muslimat NU Kolaka Dilantik

**Kolaka, SultraNET.** | PC Muslimat NU Kabupaten Kolaka masa Khidmat 2022-2027, menggelar pelantikan pengurus dan rapat kerja yang bertemakan “Meningkatkan Peran Muslimat NU ditahun Moderasi”, bertempat di Hotel Sutan Raja Kolaka. Rabu, (27/09)

Ketua Muslimat NU Kolaka terpilih Andi Wahidah menyebutkan, kegiatan kali ini bertujuan untuk memperkuat peran perempuan Indonesia dalam memajukan peradaban dunia. Menurutnya, perempuan harus punya andil dalam menciptakan peradaban.

“Dengan kepengurusan baru ini semoga seluruh Muslimat NU Kabupaten Kolaka bisa lebih maju serta solid, mandiri dan ikhlas dalam membangun peradaban.” tegasnya

Ia juga berkomitmen untuk memajukan peran perempuan dalam berbagai sektor, termasuk sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama .

Sementara itu, Asisten II menyampaikan bahwa Muslimat NU bersama organisasi wanita lainnya di Kabupaten Kolaka merupakan ujung tombak untuk menyelesaikan berbagai problematika di Kolaka.

“Semoga Muslimat NU tetap berjalan beriringan bersama pemerintah untuk terus membangun dan mensejahterahkan Kab. Kolaka di berbagai bidang.” sebutnya.

---

## Bappeda Gelar “Kick off Meeting” Mulai Bahas RPJPD Bombana Hingga 20 Tahun Kedepan

**Bombana, SultraNET.** | Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyelenggarakan kegiatan Kick Off Meeting rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bombana tahun 2025-2045. Rabu (27/9/2023).

Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa saat menyampaikan sambutan mewakili Penjabat Bupati Bombana mengatakan kegiatan Kick Off Meeting tersebut merupakan momentum yang sangat strategis sebagai penanda awal dimulainya

seluruh rangkaian dan tahapan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bombana Periode 20 tahun mendatang.

Mantan Kadis PUTR Bombana itu menyebut, kegiatan Kick Off merupakan kegiatan yang sangat penting untuk kemajuan daerah, untuk itu ia berharap agar seluruh elemen yang ada di Kabupaten Bombana dapat bersama-sama mendukung dan memberikan kontribusi positif demi mewujudkan pembangunan yang tepat, terarah dan sustainabel serta mendukung target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045.

“Amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah Kabupaten dan kota berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional,” ujar Man Arfa.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 5 tahun dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan.

Ia menyebut pelaksanaan RPJPD kabupaten Bombana pada tahun 2005-2025 telah berjalan selama 18 tahun, sehingga beberapa capaian kinerja indikator makro pembangunan kabupaten Bombana sudah dapat dilaksanakan.

Capaian dimaksud yaitu PDRB per kapita kabupaten Bombana meningkat lebih dari 10 kali lipat dari awal RPJPD, dimana pada tahun 2005 pendapatan perkapita sebesar 4,8 juta meningkat menjadi 50,75 juta pada tahun 2022.

“Seiring dengan peningkatan PDRB perkapita, angka kemiskinan dan angka pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan,” bebernya

Angka kemiskinan pada tahun 2005 sebesar 26,17 persen menurun menjadi 10,26 persen pada tahun 2022. Angka pengangguran pada tahun 2005 sebesar 15,81 persen turun menjadi 1,47 persen pada tahun 2022.

Tingkat ketimpangan pendapatan yang biasa diukur dengan indeks gini, dalam 18 tahun terakhir terjadi sedikit kenaikan dimana pada tahun 2005 indeks gini sebesar 0,320 meningkat menjadi 0,370 pada tahun 2022. Indeks pembangunan

manusia (IPM), menunjukkan capaian yang semakin membaik dimana pada tahun 2005 angka IPM sebesar 63,80 poin menjadi 66,81 poin di tahun 2022.

“Melihat capaian pembangunan yang tergambar dari capaian indikator makro, kita sepatutnya merasa bersyukur. Selain itu, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders pembangunan, terutama kepada Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat atas segala usaha kita dalam memajukan wonua bombana yang kita cinta ini,” beber Man Arfa.

Ia mengajak seluruh stakeholder pembangunan di kabupaten bombana untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasi berupa saran, masukan dan harapannya terhadap pembangunan kabupaten bombana dalam 20 tahun kedepan yang akan diterjemahkan dalam dalam visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok rpjpd kabupaten bombana tahun 2025-2045.

Demi efektivitas penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 ini, ia berpesan tetap memperhatikan tahapan proses penyusunan RPJPD agar tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu, perlu pula memperhatikan hasil evaluasi dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya serta sinergitas dengan dokumen RPJPD provinsi dan RPJP nasional serta masukan dari seluruh stakeholders pembangunan.

“Mengingat pentingnya kick off meeting RPJPD ini, kepada seluruh stakeholder dapat mengikuti dengan baik. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pembangunan kabupaten bombana akan lebih terarah, terukur dan akuntabel serta dapat menjawab isu-isu strategis kedepan,” tandasnya

Berdasarkan laporan panitia, jumlah peserta sebanyak 250 orang yang terdiri dari pimpinan DPRD Bombana, Forkopimda, perangkat daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah, Instansi Vertikal, Perusahaan Daerah, Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Anak Serta Stakeholdr terkait. (IS)

---

# Pj. Bupati Buton Hadiri Penutupan Mobile Intellectual Property Clinic 2023

**Kendari, SultraNET.** | Pj. Bupati Buton Drs. La Ode Mustari, M.Si. menghadiri secara langsung penutupan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) 2023 di Auditorium Mokodompit, Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Selasa 26 September 2023.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJIKP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kuantitas kekayaan intelektual nasional.

Hadir dalam acara tersebut Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen, S.H., M.H., Forkopimda Prov. Sultra, Rektor UHO yang diwakili Wakil Rektor III Dr. Nur Arafah, SP, MSi para kepala daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya Dirjen DJIKP, mengapresiasi program MIC karena permintaan pencatatan kekayaan intelektual tahun ini secara nasional meningkat dari tahun sebelumnya.

“Saya sangat mengapresiasi MIC yang telah dilaksanakan di seluruh Indonesia karena secara langsung memberikan dampak positif terhadap kenaikan permohonan KI dari dalam negeri menjadi 165.258 permohonan atau 17,92 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Saya optimis angka ini masih akan tumbuh di sisa Tahun 2023,” jelasnya.



### Suasana kegiatan penutupan MIC 2023

Program MIC yang telah digelar di 33 provinsi selama 42 kali selama 2023 ini juga telah memberikan dampak bagi peserta kegiatan yang berjumlah sebanyak 13.976 orang yang merasakan manfaat dari pendampingan dan konsultasi KI.

Tidak hanya itu, terdapat penambahan 458 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang tercatat pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Komunal saat dan setelah pelaksanaan MIC.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah provinsi, Kantor Wilayah Kemenkumham serta stakeholder KI lainnya di seluruh Indonesia karena dampak positif serta capaian besar dari pelaksanaan MIC dan program DJKI lainnya di tahun 2023 dapat terlaksana berkat sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan KI dengan Kementerian Hukum dan HAM,”ujarnya.

Terakhir, Min mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengimplementasikan program BBI (Bangga Buatan Indonesia) yang sejalan dengan Tahun 2023 sebagai Tahun Merek.

Sejalan dengan hal tersebut Pj. Gubernur Sultra menerangkan saat ini pemerintah daerah melakukan perencanaan yang matang dalam program pembangunan dan menyediakan anggaran yang cukup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung perlindungan kekayaan intelektual di Bumi Anoa.



Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H

“Ketika kita menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual, kita memberi sayap kepada imajinasi untuk terus mencipta dan berinovasi, menghasilkan karya-karya yang menginspirasi dan memajukan umat manusia,” pungkas Andap.

Mobile IP Clinic ini akan terus berlanjut di 2024 sebagai wujud nyata Kemenkumham melalui DJKI dan Kantor Wilayah hadir ditengah Masyarakat menyentuh lebih banyak daerah yang belum terjangkau dan masih menyimpan berbagai potensi kekayaan intelektual lainnya, sehingga akan semakin banyak karya anak bangsa yang terlindungi.

(KominfoButon / Akbar Haiqal Hat)

---

# Bupati Ahmad Safei Silaturahmi dan Temu Rakyat di Kecamatan Kolaka dan Latambaga

Kolaka, SultraNET. | Bupati Kolaka H. Ahmad Safei, SH.,MH menjelang akhir masa jabatannya sebagai Bupati Kolaka 2 periode menggelar silaturahmi dan temu rakyat serta jajanan Pemerintah Kecamatan Kolaka dan Latambaga . Selasa, (26/09)

Temu rakyat ini dilaksanakan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus berpamitan kepada seluruh elemen masyarakat .

“Saya ingin izin berpamitan, karena tinggal beberapa waktu lagi saya akan meninggalkan jabatan ini selaku Bupati Kolaka .” ucapnya



Silaturahmi dan Temu Rakyat Bupati Kolaka

Bupati Kolaka juga menyampaikan dalam waktu kurang lebih 10 tahun, beliau diberikan amanah untuk memimpin daerah ini yang juga penuh dinamika .

“Seperti yang kita ketahui, masyarakat Kabupaten Kolaka begitu besar ekspektasinya terhadap pemerintahan yang saya pimpin,” ujarnya



Silaturahmi dan Temu Rakyat Bupati Kolaka

Ia menyebut seperti yang dapat amati bersama bahwa hampir seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kolaka itu, harapan masyarakat terhadap pemerintah, baik dalam hal pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan semua berjalan sebagaimana yang telah di programkan

“Alhamdulillah, semua berjalan sebagaimana yang telah kami programkan.” tandasnya. (Kominfo)

---

## **Kadis Kominfo Sultra Buka Workshop Infrastruktur SPBE**

**Kendari, SultraNET.** | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara (Kadis Kominfo Sultra), Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd.,MM membuka Workshop Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktori Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah selama 2 (dua) hari mulai tanggal 26-27 September 2023 bertempat di Hotel Claro Kendari, Selasa, (26/9/2023).

Hadir dalam Workshop tersebut Agung Basuki Ketua Tim Pusat Data Nasional Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Bambang Dwi Anggono Direktur Layanan Aplikasi Pemerintah, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan SPBE, Direktur Keamanan Sumber, Kadis Kominfo Kolaka, Kadis Kominfo Konsel, Kadis Kominfo Muna Barat, Perwakilan Kadis Kominfo Kab/Kota se-Sultra, Kabid Aptika Prov. Sultra, Pranata Komputer Ahli Muda dan Pranata Humas Kominfo Sultra, serta hadir juga secara virtual

Sambutan Ketua Tim Pusat Data Nasional bertugas Direktorat Pelayanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Agung Basuki, salah satu tugas yang diamanatkan oleh Presiden melalui Pepres no. 95 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik kepada Kemenkominfo khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah sebagai peran regulator dan fasilitator dalam mengimplementasikan sistem pemerintah berbasis elektronik

Lanjut, Workshop Infrastruktur SPBE khususnya kita akan mengenalkan infrastruktur SPBE berupa pelayanan berbasis Cloud Computing atau komputasi awan sebagai fasilitas infrastruktur untuk seluruh pemerintah baik pusat, provinsi, kab/kota untuk seluruh satuan kerja

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sekarang istilahnya menjadi kebutuhan pokok, sekarang era transformasi digital tanpa ada fasilitas TIK penerapan dan pengembangan TIK maka pengembangan setiap wilayah, Provinsi, Kab/Kota baik pusat akan kalah untuk bersaing semua sudah serba digital.



Peserta Kegiatan Workshop Infrastruktur SPBE

Kebutuhan TIK dalam transportasi digital memang tidak hanya menjadi salah satu kunci sukses dalam transformasi digital kami melihat 3 (tiga) pilar besarnya yaitu: regulasi kebijakan, Infrastruktur dan SDM

Sambutan Kadis Kominfo Sultra, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam rangka membangun transformasi digital di Sulawesi Tenggara, sebagai bentuk komitmen kita bersama guna mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik dalam kinerja yang baik

Untuk diketahui bersama pusat data nasional merupakan percepatan transformasi digital dalam merujuk pada amanat Pepres no.95 tahun 2018 tentang SPBE. Kemudian Pj. Gubernur Sultra melakukan percepatan SPBE sudah mengimplementasikan salah satu aplikasi Kemenkumham Sisumaker kita akan meloncing dalam waktu dekat akan menghadirkan 17 Kab/Kota se-Sultra



Kadis Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd.,MM [Kiri]

Dalam melakukan percepatan transformasi digital tersebut tentu pemanfaatan TIK dan penyelenggaraan pusat data nasional akan memberikan informasi dan mendukung data center bagi Kementerian dan daerah. Maka diperlukan

pemahaman layanan pusat data nasional, melalui penyedia pusat data nasional di harapkan konsolinasi layanan dan data pemerintah dapat berlangsung lebih awal kebijakan ini akan mendorong efisiensi belajar pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan terwujudnya satu data Indonesia. Tutupnya (KInfo)

---

# **Pemkab Konut Ambil Peran Penting Pengembangan SDM Sultra**

**Wanggudu, SultraNET.** | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) terus mengambil peran penting dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana hari ini Selasa (26/09/2023) Bupati Konawe Utara Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN. Eng. menerima langsung kedatangan mahasiswa Universitas Lakidende (Uilaki).

Kedatangan Mahasiswa Unilaki di Konut dalam rangka melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 2 Kecamatan yang terpilih yaitu Kecamatan Asera dan Kecamatan Oheo.

H. Ruksamin sebagai pimpinan tertinggi di Konawe Utara berpesan kepada para mahasiswa untuk mensukseskan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dengan memberikan tugas tambahan kepada para Mahasiswa untuk bersama-sama mensukseskan Program Pemanfaatan Kebun dan Pekarangan (PPKP).



Bupati Konut, H. Ruksamin saat menyambut kedatangan Mahasiswa Universitas Lakidende di Konut

Tidak hanya memberikan tugas tambahan, H. Ruksamin juga menyiapkan petugas pendamping dalam menjalankan Program PPKP. Dinas Ketahanan Pangan dipilih menjadi pendamping untuk para mahasiswa.

“Untuk anak-anak saya yang akan melaksanakan KKN, dalam proses melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, program yang dibawa juga harus berdampak kepada masyarakat. Untuk itu saya perkenalkan Program PPKP, yang manfaatnya bisa langsung dirasakan, diantaranya kebutuhan masyarakat akan pangan dan nutrisi yang baik dapat tercukupi. Tidak hanya itu, inflasi yang hari ini juga menjadi fokus program nasional juga kita dapat selesaikan dengan program PPKP.” ungkap H. Ruksamin.

Tidak sampai disitu, sebagai bentuk support kepada Mahasiswa yang akan melaksanakan KKN di wilayah yang di pimpin nya, H. Ruksamin juga menyiapkan bantuan uang konsumsi sebesar 5 juta rupiah per posko. (S)

---

# Wakil Bupati Kolaka Tinjau Pembangunan Bantuan Rumah Kampung Bajo

Kolaka, SultraNET. | Wakil bupati Kolaka H. Muh. Jayadin, SE.,ME melakukan peninjauan bantuan pembangunan rumah masyarakat kampung bajo di kelurahan anaiwoi, kecamatan tanggetada bersama asisten II Ir. H. Abbas, MM, Ketua tim dari kementerian ibu Ira, serta seluruh pimpinan OPD yang terkait . Selasa, (26/09/2023)



Wakil bupati Kolaka H. Muh. Jayadin, SE.,ME saat meninjau Pembangunan Rumah Bantuan di Kampung Bajo

Wakil Bupati Kolaka menyampaikan, Kegiatan ini dalam rangka untuk membuktikan sejauh mana komitmen pemerintah Kabupaten Kolaka dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan strategis dari Kementerian PU dan pusat.

“Perjuangan untuk mendapatkan program ini bukanlah hal yang mudah, dimulai

dari administrasi juga dibutuhkan suatu komitmen nyata dari pemerintah Kabupaten Kolaka, dan semua itu telah kami buktikan dari seluruh Kabupaten dan kota yang mengikuti kegiatan ini, pada akhirnya Kabupaten Kolaka menjadi salah satu dari 13 Kabupaten berhasil mendapatkan program itu ." Singkatnya.

---

# **HSN 2023, Pemkab Bombana Berikan Sertifikat Penghargaan kepada BPS**

**Bombana, SultraNET.** | Sekda Bombana, Drs. Man Arfa, M.Si, mewakili Pj. Bupati Bombana, menghadiri Peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) di Halaman Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Bombana pada Selasa (26/9/2023).

Acara ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan memberikan penghargaan atas kinerja serta dukungan BPS dalam pelaksanaan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023, Sensus Pertanian (ST) 2023, dan survei lainnya di Wilayah Kabupaten Bombana.

Dalam rangka memperingati HSN 2023, BPS Bombana memberikan sejumlah penghargaan kepada OPD sebagai bentuk apresiasi atas sinergitas dalam pembangunan di Kabupaten Bombana.

Sekda Man Arfa, dalam sambutannya, mendorong seluruh undangan, khususnya para Kepala OPD dan Camat, untuk memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan BPS.

Ia menekankan pentingnya data yang divalidasi dan diolah dengan baik oleh BPS, yang nantinya akan digunakan dalam proses penyusunan perencanaan.

"Sekali lagi saya harap kepada semua Camat, tolong beri dukungan sepenuhnya terhadap kegiatan statistik di kecamatan, dan juga para Kepala OPD, semua

permintaan data yang akan dirilis sebagai data daerah tolong dibantu teman-teman dari statistik,” ungkap Sekda Bombana.

Man Arfa menyoroti pentingnya satu data dalam manajemen data pemerintahan, dan ia menekankan kerjasama serta silaturahmi yang baik antar semua pihak.

Dalam acara ini, Pemerintah Kabupaten Bombana memberikan Sertifikat Penghargaan kepada BPS Kabupaten Bombana atas kerjasama dan partisipasinya dalam mendukung kinerja TPID Kabupaten Bombana.

Penghargaan ini meraih Nominasi TPID Award Berprestasi Kawasan Sulawesi pada tanggal 10 Juli 2023, yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta. (\*)

---

# **Bupati Kolaka H. Ahmad Safei Silaturahmi dan Temui Rakyat di Kecamatan Baula**

**Kolaka, SultraNET.** | Bupati Kolaka H. Ahmad Safei, SH.,MH menjelang akhir masa jabatannya sebagai Bupati Kolaka 2 periode menggelar silaturahmi dan temu rakyat serta jajaran Pemerintah Kecamatan Baula . Senin, (25/09)

Temu rakyat ini dilaksanakan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus berpamitan kepada seluruh elemen masyarakat Baula.



Bupati H. Ahmad Safei saat Silaturahmi dan Temui Rakyat di Baula

Bupati Kolaka mengucapkan pula terima kasih kepada segenap masyarakat dan semua elemen Kecamatan Baula yang telah hadir .

“Menjelang masa jabatan saya berakhir, saya mohon pamit dan sekaligus mengucapkan terima kasih serta mohon maaf, semoga tali silaturahmi tetap terjalin, dan sekaligus mohon izin untuk melanjutkan perjuangan menuju Senayan .” Ucapnya

---

**Pj. Bupati Bombana Minta Verifikasi Ulang Data Penerima**

# Bansos di

**Bombana, SultraNET.** | Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, mengumpulkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membahas kendala dalam pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) di lapangan. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah masalah, termasuk penerima Bantuan Sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah layak, penerima yang telah meninggal, dan adanya penerima bantuan ganda. Berdasarkan hal ini ia meminta pendataan ulang untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pada Senin (25/9/2023)

“Saya meminta bantuan kepada pendamping PKH untuk memberikan solusi sehingga 90 persen penerima bantuan sosial di Bombana adalah warga yang betul-betul membutuhkan dan sesuai kriteria penerima manfaat,” ungkapnya.

Pj. Bupati menyatakan bahwa meskipun sudah banyak Bansos yang disalurkan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem di Bombana, hasilnya belum signifikan. Beliau menambahkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bombana masih tinggi, di atas 10 persen, dan miskin ekstrem di atas 1 persen.

H. Burhanuddin menyatakan bahwa miss-pendataan menyebabkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan. Oleh karena itu, beliau meminta pendamping PKH untuk melakukan pendataan rutin guna menghindari kesalahan dalam pendataan penerima bantuan.

“Guna memaksimalkan pendataan agar bantuan benar-benar tepat sasaran, saya secepatnya akan membentuk tim terpadu agar pendataan penerima bantuan dapat diberikan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Laode Ahmad, koordinator PKH Kabupaten Bombana, mengapresiasi inisiatif Pj. Bupati Bombana dalam mengadakan pertemuan dan berdiskusi dengan tim pendamping PKH.

“Kami berharap diskusi ini dapat segera ditindaklanjuti untuk memastikan bahwa penerima bantuan sosial di Kabupaten Bombana sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” tandasnya (Kominfo)